
Strategi Greenpeace dalam Menyuarakan Kepentingan Konservasi di Samudra Antartika Tahun 2017-2020

Luh Made Krishna Bhakti Sastri¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Meningkatnya aktivitas industri penangkapan kril di Samudra Antartika selama beberapa dekade belakangan telah membawa ancaman bagi ekosistem samudra tersebut, terutama bagi keberadaan sejumlah spesies seperti penguin dan paus yang bergantung pada kril sebagai makanan utama. Fenomena ini mendorong hadirnya Greenpeace sebagai aktor non-negara untuk mendesak CCAMLR dan perusahaan-perusahaan penangkap kril dalam mengambil langkah perlindungan yang lebih serius, salah satunya dalam bentuk *Marine Protected Areas*. Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang diadopsi oleh Greenpeace dalam melakukan advokasi. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan sumber data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan konsep ENGO dan Jaringan Advokasi Transnasional. Hasil temuan menyimpulkan bahwa Greenpeace sebagai sebuah ENGO telah menerapkan keempat taktik dalam strategi Jaringan Advokasi Transnasional dalam menjalankan upaya advokasinya.

Kata-kunci : ENGO, Greenpeace, Jaringan Advokasi Transnasional, Samudra Antartika

Abstract

The increase of krill-catching industry's activities in the Antarctic Ocean for the past few decades has threatened the ocean's ecosystem, especially krill-dependent species such as penguins and whales. This phenomenon encouraged Greenpeace as a non-state actor to push the CCAMLR and krill-fishing companies to adopt a stricter protection measure, one of them through the form of Marine Protected Areas. Seeing the aforementioned problem, this study is aimed to describe the strategy adopted by Greenpeace in its advocacy. Using qualitative methods with secondary data, this study was analyzed using the concept of Environmental NGO and Transnational Advocacy Network. The result concludes that as an ENGO, Greenpeace has applied the four tactics of the Transnational Advocacy Network in performing its advocacy efforts.

Keywords : Antarctic Ocean, ENGO, Greenpeace, Transnational Advocacy Network

Kontak Penulis

Luh Made Krishna Bhakti Sastri

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan P.B. Sudirman, Denpasar, Bali

Telp: +6282188432468 Fax: -

E-mail : made.krishna@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Samudra Antartika merupakan salah satu dari lima samudra yang ada di bumi, dan posisinya yang berada di ujung paling selatan membuat lautan ini dikenal pula dengan nama Samudra Selatan. Selama ini, wilayah perairan tersebut telah menjadi habitat bagi kisaran 10.000 spesies khas kutub (ASOC, n.d.-a). Selain terancam oleh akibat perubahan iklim, wilayah Samudra Antartika juga memperoleh tekanan tambahan dari aktivitas manusia, khususnya dalam hal ekstraksi sumber daya bahari. Adapun yang menjadi target penangkapan adalah spesies kril antartika, hewan krustasea kecil yang menjadi pusat dari jaringan makanan samudra tersebut. Industri penangkapan kril di Antartika pun mengalami perkembangan pesat dengan adanya peningkatan permintaan terhadap produk-produk kril bagi industri farmasi dan akuakultur (Cavanagh et al. dalam Wienecke et al., 2021).

Menyadari adanya urgensi untuk melindungi ekosistem samudra tersebut dari potensi eksploitasi industri penangkapan kril yang kian berkembang, dibentuklah *The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) pada tahun 1982 sebagai sebuah komisi internasional dengan objektif utama yang spesifik berupa konservasi spesies dan ekosistem Samudra Antartika. Komisi yang terdiri atas 27 negara anggota ini bertugas untuk mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya bahari Antartika agar selaras dengan prinsip-prinsip konservasi yang telah mereka tetapkan (CCAMLR, 2022; AOA, 2013). Adapun pengaturan tersebut diimplementasikan melalui penetapan batas tangkapan, khususnya Area 48 sebagai area dengan konsentrasi penangkapan tertinggi.

Akan tetapi, berdasarkan data yang dirilis oleh CCAMLR Secretariat (2021), ditemukan bahwa

hasil tangkapan di Area 48 mengalami peningkatan yang konsisten di tahun 2018-2020. Terjadinya peningkatan penangkapan dari industri lantas mengurangi jumlah kril yang tersedia bagi pinguin pada masa pembiakannya, dan dengan demikian meningkatkan kompetisi di antara populasi pinguin dengan industri yang berupaya untuk mendapatkan kril dari populasi yang sama (Krüger et al., 2020).

Melihat adanya fenomena di atas, upaya perlindungan yang lebih serius dalam bentuk *Marine Protected Area* (MPA) menjadi sebuah langkah yang penting untuk dilakukan. Sejak 2009, CCAMLR telah menetapkan sejumlah wilayah perairan sebagai MPA atas pertimbangan adanya kekayaan biodiversitas dan kerentanan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Penetapan MPA diharapkan dapat mengurangi tekanan manusia bagi ekosistem laut dan membentuk ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. Meski demikian, hingga saat ini hanya sejumlah 5% dari total area Samudra Antartika yang mendapat perlindungan penuh dari CCAMLR (ASOC, n.d.-a).

Ketika upaya dari aktor negara dinilai kurang serius dalam menangani isu lingkungan, di sinilah seringkali dapat kita amati munculnya NGO sebagai aktor non-negara untuk menyuarakan isu tersebut (McCormick, 2010). Salah satu aktor yang aktif terlibat dalam isu ini adalah Greenpeace, sebuah *Environmental Non-Governmental Organization* (ENGO) yang telah menyuarakan kepentingan konservasi terhadap Antartika sejak tahun 1980-an. Dalam beberapa tahun terakhir, Greenpeace telah berupaya mendesak CCAMLR untuk merealisasikan komitmennya dalam penetapan MPA. Sehubungan dengan hal ini, Greenpeace bersama dengan beberapa NGO lain yang tergabung dalam *Antarctic and Southern Ocean Coalition* (ASOC) telah mengkampanyekan

penetapan Laut Weddell sebagai sebuah MPA yang proposalnya diajukan oleh Jerman dan Uni Eropa (Greenpeace, 2017). Dengan total wilayah seluas sekitar 2.2 juta km², Laut Weddell akan menjadi MPA terluas di dunia jika proposalnya berhasil mengantongi konsensus dari negara-negara anggota CCAMLR (ASOC, n.d.-b).

Berkenaan dengan isu ini, Greenpeace telah melakukan upaya advokasi kepada negara-negara anggota CCAMLR dan perusahaan dalam industri penangkapan kril yang dilakukan melalui kerja samanya dengan beragam aktor yang meliputi berbagai NGO lingkungan, media, yayasan, hingga peneliti dan *public figure*. Dilansir dari Greenpeace UK (2018), kampanye “*Protect the Antarctic*” yang diluncurkan Greenpeace menuai kesuksesan dalam menghimpun dukungan sebanyak 2,7 juta orang dari kalangan publik. Sementara itu, upaya *lobbying* Greenpeace telah berhasil membuat asosiasi industri penangkapan kril membatasi aktivitas penangkapannya di wilayah sekitar proposal MPA (Greenpeace UK, 2018). Akan tetapi, hingga kini Greenpeace masih belum dapat mencapai tujuannya untuk menetapkan Laut Weddell sebagai MPA akibat belum tercapainya konsensus dari negara-negara anggota CCAMLR.

Melihat hal ini, menjadi menarik untuk melakukan analisis terhadap penerapan strategi Greenpeace dalam isu ini melalui rumusan masalah berupa “Bagaimana strategi Greenpeace dalam upayanya untuk menyuarakan kepentingan konservasi di Samudra Antartika pada tahun 2017-2020?”

Dalam melakukan penelitian, telah ditemukan berbagai literatur yang berkontribusi memberikan pengetahuan mengenai fenomena konservasi lingkungan dan keterlibatan NGO dalam isu tersebut. Dari banyaknya literatur yang ada, terdapat tiga buah tulisan ilmiah

dengan tema serupa yang digunakan sebagai rujukan dan pembanding dari penelitian ini. Literatur pertama yang digunakan dalam Kajian Pustaka ditulis oleh Andrea Capurro dengan judul “*The Fragile Antarctic Peninsula: Conserving Biodiversity through Marine Protected Areas*”. Karya Capurro (2021) memberi gambaran mengenai pentingnya penetapan MPA demi menjaga keanekaragaman hayati di wilayah Antartika. Akan tetapi, tulisan Capurro tidak memuat pemaparan yang lebih mendetail mengenai keterlibatan dari aktor non-negara seperti NGO dalam proses penetapan MPA.

Karya kedua adalah sebuah artikel jurnal berjudul “Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015” karya Yanuar Albertus. Tulisan Albertus (2021) menjadi rujukan bagi Peneliti dalam menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional untuk membedah strategi yang dijalankan Greenpeace dalam penelitian ini. Namun berbeda dengan Albertus yang membahas penggunaan strategi Jaringan Advokasi Transnasional terhadap korporasi sebagai target utamanya, penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan strategi tersebut bagi tidak hanya perusahaan, tetapi juga negara sebagai aktor targetnya.

Kasus yang diangkat Albertus (2021) menunjukkan keberhasilan penggunaan Jaringan Advokasi Transnasional sebagai strategi yang dimanfaatkan oleh sebuah NGO. Akan tetapi, seperti yang disebutkan Keck dan Sikkink (1999), pemanfaatan jaringan ini tidak selalu menuai keberhasilan dalam setiap kasusnya. Maka dari itu, Peneliti menggunakan tulisan karya Huelshoff dan Kiel (2012) bertajuk “*Swan Song: Transnational Advocacy Networks and Environmental Policy in Chile – The Case of The Cisnes de Cuello Negro*” yang dapat melengkapinya kekurangan tersebut. Pada kasus di

Chile, jaringan digunakan agar dapat membawa isu yang terjadi di tingkat lokal ke ranah internasional, sementara Greenpeace membutuhkan jaringan untuk mendapatkan akses terhadap negosiasi internasional yang dilakukan di CCAMLR dan pada saat yang sama meningkatkan kesadaran publik di tingkat global.

Demi menjawab rumusan permasalahan penelitian, akan digunakan dua buah konsep berupa *Environmental Non-Governmental Organization* (ENGO) serta Jaringan Advokasi Transnasional sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Kedua konsep akan digunakan untuk menjelaskan peran serta strategi Greenpeace dalam isu ini.

Menurut McCormick (2010), kemunculan NGO sebagai sebuah entitas dalam arena politik global tidak terlepas dari timbulnya kesadaran masyarakat terhadap ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan isu-isu tertentu secara unilateral, biasanya dapat diakibatkan oleh tingginya tingkat kompleksitas dari suatu isu atau kurangnya aksi nyata dari pihak negara dalam penyelesaian isu tersebut. Dalam konteks permasalahan lingkungan, McCormick (2010) juga menambahkan bahwa pengetahuan mengenai isu lingkungan belum sepenuhnya dapat dipahami oleh semua pihak. Melihat kondisi ini, disadari bahwa mereka membutuhkan suatu gerakan yang dapat menyuarakan isu-isu tersebut serta menciptakan tekanan yang mampu mendorong terjadinya perubahan sosial atau politik berkenaan dengan isu yang dibawanya. Inilah yang memotivasi pembentukan *Environmental NGO* atau ENGO, yang dalam konteks ini dapat dipahami sebagai jenis NGO yang memiliki kepentingan dan keahlian dalam isu lingkungan, baik itu dalam satu isu yang spesifik maupun variasi dari beragam isu lingkungan.

Breitmeier dan Rittberger (1997) memaparkan dua jenis utama dari ENGO yang diidentifikasi berdasarkan aktivitasnya, yakni NGO yang berfokus dalam melakukan advokasi (*Environmental Advocacy Organizations*) dan dengan tujuan utama untuk menyediakan layanan bagi masyarakat (*Environmental Service Organizations*). Mengutip Breitmeier dan Rittberger (1997), advokasi sederhananya adalah upaya untuk memengaruhi proses pengembangan kebijakan. Dalam konteks permasalahan lingkungan, NGO biasanya berusaha untuk memengaruhi suatu negosiasi antarpemerintah di tingkat internasional atau mendorong negara untuk mengimplementasikan peraturan internasional yang telah disepakati. Namun dalam perkembangannya, advokasi juga dapat ditujukan bagi aktor non-negara lainnya seperti korporasi. Menurut Lewis (2001), berbagai tindakan yang dilakukan oleh NGO dalam kegiatan advokasi biasanya meliputi pemilihan isu, pengelolaan informasi serta hubungan dengan pihak lain, serta mencari *leverage* agar mereka bisa memiliki pengaruh yang lebih kuat.

Sejalan dengan pemaparan di atas, Tin (2013) menyebutkan bahwa ENGO telah berperan sebagai salah satu aktor penting dalam hal advokasi isu lingkungan di Antartika. Tin (2013) menerangkan bahwa ENGO mampu menjangkau publik dalam lingkup yang lebih luas dan membangun kesadaran publik akan pentingnya berbagai isu lingkungan yang ditemui di Antartika. Di samping itu, mereka juga telah berhasil menarik perhatian negara-negara terhadap isu-isu lingkungan di Antartika. Konsep ENGO dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji peran Greenpeace dalam advokasi isu lingkungan di Antartika.

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam melakukan advokasi, NGO tentu perlu mengadopsi strategi dan taktik tertentu demi

memaksimalkan peluang keberhasilannya. Mengutip Eilstrup-Sangiovanni (2019) yang sejalan dengan Dellmuth dan Tallberg (2017), strategi dapat didefinisikan sebagai pendekatan umum yang digunakan oleh kelompok advokasi dalam menghadapi suatu isu tertentu. Adapun salah satu bentuk strategi yang dapat diadopsi oleh NGO adalah melalui penggunaan Jaringan Advokasi Transnasional dalam melakukan upaya advokasinya.

Menurut penjelasan Keck dan Sikkink (1998), suatu Jaringan Advokasi Transnasional biasanya terdiri atas berbagai aktor domestik maupun internasional yang meliputi NGO, organisasi advokasi atau penelitian, gerakan sosial, media, yayasan, kalangan intelektual, bagian dari organisasi antarpemerintah, dan lain sebagainya. Di antara aktor-aktor tersebut, NGO biasanya mengambil peran sebagai salah satu aktor utama (Sri Upayoni, et al. 2021). Adapun lemen penting yang menyatukan semua aktor adalah adanya kesamaan nilai dan wacana, dengan hubungan yang melibatkan adanya pertukaran informasi dan jasa dalam intensitas yang tinggi (Keck & Sikkink, 1998). Mereka meyakini bahwa melalui pembentukan jaringan mereka dapat memperbesar gaung dari gerakannya, dan dengan demikian mampu membawa misi dan isu-isu yang mereka kampanyekan selangkah lebih maju dalam mencapai tujuannya. Jaringan ini juga identik dengan keahliannya untuk melakukan *framing* terhadap isu yang menjadi salah satu langkah awal dalam gerakannya. *Framing* dapat membuat suatu isu menjadi lebih mudah dipahami oleh khalayak yang menjadi target mereka, sekaligus memusatkan perhatian publik dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan mengenai isu yang sedang diadvokasikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemanfaatan dari suatu strategi biasanya diikuti dengan penggunaan taktik-taktik

tertentu dalam rangka pencapaian tujuannya. Mengutip Oliver dalam Ramanath dan Ebrahim (2010), taktik dapat didefinisikan sebagai seperangkat tindakan yang digunakan untuk mengidentifikasi serta mendefinisikan suatu bentuk strategi. Melalui pengertian ini, Ramanath dan Ebrahim (2010) menyimpulkan bahwa taktik adalah intervensi nyata yang berbentuk aksi atau tindakan yang dapat dilihat sebagai bagian dari suatu strategi.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Keck dan Sikkink juga menguraikan sejumlah taktik yang biasanya dimanfaatkan oleh suatu Jaringan Advokasi Transnasional. Taktik pertama berupa *information politics*, yang dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memobilisasi informasi yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Selanjutnya, taktik kedua adalah *symbolic politics*, atau kemampuan untuk mempergunakan simbol-simbol atau kisah yang dapat memberikan gambaran kepada audiens mengenai situasi tertentu berkaitan dengan isu yang diangkat. Taktik berikutnya adalah *leverage politics*, atau kapabilitas untuk menggandeng aktor dengan kekuasaan yang lebih besar dan memanfaatkan kuasanya untuk membawa pengaruh bagi mereka yang berada pada posisi lebih lemah. Terakhir, *accountability politics* sebagai taktik keempat dapat dipandang sebagai upaya untuk membuat aktor target bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya mereka promosikan. Demikianlah melalui taktik-taktik ini, suatu Jaringan Advokasi Transnasional dapat mencapai tujuannya dalam mengubah atau menetapkan suatu kebijakan, maupun membuat aktor target mengimplementasikan norma-norma tertentu yang sejalan dengan norma dan kepentingan yang dibawanya. Dalam penelitian ini, konsep Jaringan Advokasi Transnasional digunakan untuk menganalisis strategi Greenpeace dalam upayanya untuk menyuarakan kepentingan

konservasi di Samudra Antartika. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan Greenpeace dalam mencapai tujuannya merepresentasikan taktik-taktik yang dijabarkan di dalam konsep ini.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam upayanya untuk menyuarkan kepentingan konservasi di Samudra Antartika pada tahun 2017-2020.

METODE

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini berjenis deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Usman & Akbar (2008) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengedepankan pemahaman dan interpretasi makna dari suatu fenomena atau peristiwa sosial. Dengan berjenis kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Greenpeace dalam menyuarkan kepentingan konservasinya di Samudra Antartika.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yakni informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama. Data diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan upaya konservasi Antartika oleh Greenpeace baik itu dalam bentuk buku, jurnal, situs resmi organisasi pemerintah maupun non-pemerintah internasional, situs resmi badan pemerintah, hingga portal berita yang tergolong kredibel. Selain itu, Peneliti juga menggunakan berbagai dokumen yang berupa laporan dari pemerintah negara, organisasi internasional, agenda pertemuan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya.

Sementara dalam melakukan analisis, Peneliti menggunakan metode analisis yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman dengan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pada tahap reduksi dilakukan proses identifikasi unit yang dilanjutkan dengan kategorisasi dan sintesisasi. Penyajian data lalu dituangkan ke dalam bentuk teks naratif, grafik, serta bagan. Setelah itu, dapat dilakukan proses verifikasi dan tinjauan ulang terhadap hasil temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Industri Kril dan Penetapan MPA di Samudra Antartika

Sejak awal munculnya industri penangkapan kril di Antartika, dapat diamati bahwa angka tangkapan kril antartika selalu menjadi yang terbesar dibandingkan dengan spesies lain seperti *antarctic* dan *patagonian toothfish*. Ini tak ayal menjadikannya sebagai industri perikanan dengan skala terbesar di wilayah tersebut (Nicol & Foster, 2016).

Dengan adanya perkembangan teknologi penangkapan, industri ini telah mengalami peningkatan aktivitas penangkapan baik itu dari segi waktu hingga jumlah tangkapan. Sejak 2010, Norwegia telah menjadi pemain terbesar dalam industri ini dengan mengantongi 60,9% dari total tangkapan kril di dekade 2010-2020, disusul oleh Tiongkok dan Korea Selatan masing-masing sebesar 13,8% (CCAMLR Secretariat, 2021). Mengingat pentingnya status kril sebagai spesies kunci dan pusat jaringan makanan bagi Samudra Antartika, jika industri ini tidak mampu dikelola dengan baik maka berpotensi dapat membawa imbas buruk yang menyebar ke keseluruhan ekosistem samudra tersebut.

Melihat situasi ini, penetapan MPA oleh CCAMLR menjadi salah satu langkah krusial dalam upaya untuk melindungi keseluruhan samudra tersebut. Meski demikian, proses

penetapan MPA harus tersendat dalam waktu yang lama dengan adanya penolakan yang dinyatakan oleh negara-negara anggota, seperti Tiongkok dan Rusia dengan adanya kepentingan yang cukup kuat dalam sektor perikanan (Sholihat et al., 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian konsensus menjadi hal yang sulit dengan adanya beragam kepentingan yang melatarbelakangi negara anggota. Melihat situasi ini, adanya kepedulian dari NGO seperti Greenpeace, ASOC, WWF, dan The Pew Charitable Trusts mendorong mereka untuk menyuarakan isu ini.

Greenpeace dan Advokasi Isu Konservasi di Antartika

Sejak pembentukannya di Kanada pada tahun 1971, Greenpeace telah menjadi salah satu ENGO terbesar di dunia yang berperan aktif dalam upaya advokasi berbagai isu lingkungan, dimulai dari isu deforestasi dan kebakaran hutan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, eksploitasi minyak, gerakan anti-nuklir, hingga perlindungan terhadap ekosistem lautan. Hal ini membuat Greenpeace dapat diidentifikasi sebagai sebuah ENGO yang menurut McCormick (2010) dicirikan dengan kepentingan dan keahliannya dalam berbagai variasi isu lingkungan. Lebih spesifik lagi, Greenpeace juga dapat dikategorikan sebagai *Environmental Advocacy Organization* sebagaimana pada berbagai isu tersebut di atas, Greenpeace telah berupaya untuk menyuarakannya kepada publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus memanfaatkan pengaruh yang dimiliki publik untuk menekan aktor-aktor terkait seperti pemerintah, korporasi, maupun organisasi internasional untuk bergerak menyelesaikan isu tersebut. Dalam kampanyenya, Greenpeace kerap melakukan aksi-aksi kreatif yang konfrontatif dengan prinsip tanpa kekerasan (*non-violent direct action*) (Arijayanti et al., 2023).

Khususnya di wilayah Antartika, upaya advokasi Greenpeace dimulai melalui keterlibatannya dalam mengkampanyekan penetapan Antartika sebagai World Park yang gagasannya pertama kali dicetuskan pada 1979. Disebutkan dalam Greenpeace USA (n.d.) bahwa pada akhir 1980 hingga awal 1990-an, Greenpeace terlibat dalam mengkampanyekan penetapan *Environmental Protocol* oleh negara-negara *Antarctic Treaty* yang dipicu akibat insiden tumpahan di Alaska. Tidak hanya itu, Greenpeace juga secara aktif terlibat dalam kampanye anti perburuan paus pada pertengahan tahun 1970-an. Kampanye *'Save the Whales'* Greenpeace berhasil memusatkan perhatian publik terhadap industri perburuan paus dan membantu mempopulerkan gerakan *anti-whaling* di masa itu (Greenpeace International, 2018d). Upaya advokasi Greenpeace juga dilakukan melalui *lobbying* terhadap negara-negara pemburu paus, dimana bentuk keberhasilan Greenpeace saat itu dilihat dari penetapan moratorium terhadap perburuan paus secara komersial oleh *International Whaling Commission*.

Dengan demikian, uraian mengenai upaya-upaya advokasi Greenpeace di atas selaras dengan penjelasan Tin (2013) yang menyebutkan bahwa ENGO mengambil peran dalam advokasi isu lingkungan di Antartika, khususnya dalam hal diseminasi informasi untuk membangun kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di Antartika. Berkat kepedulian serta keberhasilan dari berbagai upaya advokasinya, Greenpeace secara perlahan mampu meningkatkan legitimasinya sebagai sebuah aktor di mata negara-negara *The Antarctic Treaty*, ditambah dengan adanya profesionalisme Greenpeace dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di Antartika.

Terkait dengan isu penetapan MPA, Greenpeace menjadi salah satu ENGO yang

terlibat aktif dalam upaya advokasi isu ini. Pasca diberlakukannya *Ross Sea Region* MPA pada 2017, Greenpeace melihat adanya momentum dan peluang untuk menyuarakan proposal *Weddell Sea MPA* agar penetapannya disetujui pada pertemuan tahunan CCAMLR selanjutnya di 2018 (Paglia, 2019). Ini mendorong organisasi tersebut untuk meluncurkan kampanye global '*Protect the Antarctic*' pada akhir 2017. Dalam kampanye tersebut, Greenpeace menargetkan negara-negara anggota CCAMLR serta perusahaan-perusahaan dalam industri penangkapan kril yang beroperasi di Samudra Antartika. Tujuan utama dari kampanye tersebut adalah untuk mendesak pembentukan MPA di kawasan Samudra Antartika, khususnya di Laut Weddell. Langkah ini diharapkan mampu melindungi ekosistem wilayah samudra tersebut dari tekanan yang ditimbulkan oleh industri penangkapan kril, dimana pelaksanaan upaya advokasi ini akan dijelaskan pada subbagian berikutnya.

Analisis Strategi Greenpeace

Dalam melakukan upaya advokasinya, dapat diidentifikasi bahwa Greenpeace memanfaatkan Jaringan Advokasi Transnasional sebagai bentuk strateginya. Ini terlihat dari Greenpeace yang telah menerapkan keempat taktik yang dijabarkan dalam Jaringan Advokasi Transnasional, yakni *information politics*, *symbolic politics*, *accountability politics*, serta *leverage politics*. Dalam upayanya untuk menekan aktor target, Greenpeace bergerak dengan melibatkan beragam variasi aktor dalam jaringan yang meliputi sesama ENGO internasional lain seperti WWF dan The Pew Charitable Trusts, media massa internasional seperti The Guardian, CNN, BBC, Reuters, dan Al Jazeera, berbagai tokoh publik, individu dari kalangan ahli dan peneliti, serta aktivis lainnya di seluruh dunia yang secara sukarela melibatkan

diri mereka dalam berbagai kegiatan advokasi. Adapun aktor-aktor yang tergabung dalam jaringan ini disatukan atas dasar persamaan nilai, dimana mereka meyakini bahwa Samudra Antartika beserta ekosistem di dalamnya adalah wilayah yang patut dijaga kelestariannya, dan hendaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak mengabaikan kepentingan konservasi. Atas dasar kesamaan tersebut, para aktor di atas kemudian bergerak untuk menyebarkan isu, gagasan, serta nilai yang dijunjung dalam upayanya untuk mengubah perilaku dari aktor target.

Dalam konteks isu ini, pemanfaatan kekuatan jaringan dalam melakukan advokasi menjadi penting karena mereka membutuhkannya untuk mengamplifikasi isu yang dibawa serta melipatgandakan akses yang dapat dimanfaatkan untuk menekan aktor-aktor yang menjadi targetnya. Di samping itu, dengan melihat bahwa isu konservasi Antartika adalah sebuah isu global, penggunaan Jaringan Advokasi Transnasional diyakini mampu memperbesar gaung dari isu tersebut dengan membawanya kepada audiens yang lebih luas di tingkat global. Ini selaras dengan penjelasan Keck dan Sikkink (1998) yang menyebutkan bahwa suatu Jaringan Advokasi Transnasional dapat ditemui pada isu-isu dimana para aktivis meyakini bahwa langkah *networking* secara transnasional mampu membantu memajukan misi mereka melalui penyebaran informasi, memperluas akses terhadap publik, serta melipatgandakan akses institusional.

Sepanjang tahun 2017-2020, terlihat bahwa Greenpeace telah melakukan berbagai jenis upaya advokasi, termasuk di dalamnya memberikan edukasi kepada publik, melakukan berbagai aksi simbolik, *framing*, serta menekan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan aktor target demi menciptakan tekanan yang lebih besar. Tidak hanya itu, Greenpeace juga memanfaatkan jaringan *lobbying* yang

dimilikinya untuk melobi aktor target. Secara keseluruhan, upaya advokasi Greenpeace dalam isu ini menuai beberapa keberhasilan. Khususnya berkaitan dengan upayanya untuk memengaruhi perilaku perusahaan-perusahaan dalam industri kril, Greenpeace telah berhasil membuat mereka bersedia untuk membatasi aktivitas penangkapannya di sekitar area yang berstatus dalam pertimbangan untuk dilindungi di bawah mekanisme MPA. Ini menunjukkan bahwa Greenpeace telah mencapai tujuan advokasi, yakni untuk meyakinkan aktor target agar berperilaku sesuai dengan tuntutan yang dibawa Greenpeace.

Di sisi lain, sayangnya respon dari negara-negara anggota CCAMLR sebagai target advokasi tidak sesuai dengan harapan. Pada pertemuan tahunan CCAMLR, hampir seluruh negara anggota menyatakan persetujuannya terhadap penetapan *Weddell Sea MPA*, terkecuali Tiongkok dan Rusia yang menyuarakan pertidaksetujuannya. Dengan adanya hal ini, Greenpeace belum dapat mencapai tujuan advokasinya terhadap negara-negara anggota CCAMLR untuk menetapkan *Weddell Sea MPA*. Adanya hambatan tersebut lantas membuat Greenpeace berupaya membawa isu tersebut ke forum PBB yang dipercaya dapat membawa pengaruh yang lebih besar untuk mendesak CCAMLR. Akan tetapi, langkah ini belum membuahkan hasil sebagaimana perjanjian tersebut masih berada pada tahap negosiasi.

Pada subbagian di bawah ini, akan dijabarkan secara lebih lanjut penerapan strategi Greenpeace dalam advokasi isu konservasi di Samudra Antartika terkait dengan industri kril dan penetapan MPA. Berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan oleh Greenpeace merepresentasikan penerapan dari keempat jenis taktik yang diuraikan dalam konsep Jaringan Advokasi Transnasional oleh Keck dan Sikkink, yang meliputi *information politics*,

symbolics politics, *accountability politics*, dan *leverage politics*.

Taktik *Information Politics*

Information politics merujuk pada taktik yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, lalu secara politis menyebarluaskan informasi demi mendapatkan simpati maupun dukungan terhadap isu yang dibawanya. Dalam konteks isu ini, *information politics* dimulai dari tahap penelitian dan pengumpulan informasi yang menghasilkan publikasi dua buah laporan. Melalui pelacakan sinyal *Automatic Identification System (AIS)*, Greenpeace mengumpulkan data berupa pola pergerakan dan aktivitas penangkapan dari kapal *trawler* penangkap kril yang beroperasi di Samudra Antartika dalam kurun waktu 2012-2017, lalu disusun ke dalam laporan yang berjudul "*Licence to Krill: The Little-Known World of Antarctic Fishing*". Melalui laporan tersebut, Greenpeace menyimpulkan bahwa aktivitas penangkapan kril yang dilakukan oleh industri selama ini telah membawa risiko yang mengancam spesies penguin dan paus, terlepas dari industri tersebut yang dicap memiliki reputasi yang baik dalam asesmen keberlanjutannya. Sementara itu, pasca dilakukannya ekspedisi dengan melibatkan kalangan ahli dan peneliti dalam bidang biologi kelautan, Greenpeace merilis laporan yang bertajuk "*Microplastics and Persistent Fluorinated Chemicals in the Antarctic*" untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa ditemukannya zat polutan di Antartika mengindikasikan adanya urgensi bagi ditetapkannya perlindungan yang lebih serius bagi wilayah tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Greenpeace dapat diidentifikasi sebagai penerapan dari taktik *information politics*, sebagaimana aksi tersebut memberikan informasi yang dapat dipahami oleh publik maupun aktivis lainnya yang secara geografis berada jauh dari Samudra Antartika sesuai

pemaparan Keck dan Sikkink (1998). Tidak hanya mengedukasi publik melalui publikasi laporan, penyebaran informasi juga dapat diperluas ketika laporan tersebut digunakan sebagai dasar pemberitaan oleh berbagai media nasional dan internasional. Sementara itu, informasi yang telah diperoleh Greenpeace dalam investigasinya terhadap kapal-kapal penangkap kril juga mampu menguatkan posisi Greenpeace dalam *lobbying* dan dialog yang dilakukan dengan sejumlah perusahaan dalam industri kril.

Tidak hanya itu, Greenpeace meluncurkan laman resmi bagi publik agar dapat secara praktis memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai aksi kampanyenya. Selain membentuk laman resmi utama yang beralamat protecttheantarctic.org, Greenpeace juga membuat laman kampanye khusus di dalam berbagai situs resminya di masing-masing negara seperti Greenpeace UK (greenpeace.org.uk), Greenpeace Germany (greenpeace.de), Greenpeace China (greenpeace.org.cn), dan berbagai situs negara lainnya. Dilakukannya publikasi pada berbagai situs di atas menunjukkan elemen transnasional dengan melibatkan jaringan Greenpeace yang tersebar di seluruh dunia.

Selain untuk menyebarkan informasi, pembuatan laman kampanye juga mampu membantu Greenpeace dalam memperluas jaringan yang dimilikinya. Melalui fitur yang memungkinkan para pengunjung situs untuk mendaftarkan diri sebagai pendukung, menandatangani petisi, memberikan donasi, hingga mengirimkan pesan kepada anggota CCAMLR, Greenpeace mampu melibatkan lebih banyak orang dalam menjalankan misinya yang dibuktikan dengan perolehan dukungan lebih dari dua juta orang. Perluasan jaringan merupakan elemen yang esensial dalam upaya advokasi, sebagaimana hal tersebut mampu membantu menguatkan pesan

yang ingin disampaikan kepada aktor yang menjadi target advokasi (Albertus, 2021).

Dalam rangka mendukung proses diseminasi informasi kepada publik, kemitraan dari aktor-aktor dalam jaringan dengan media menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan taktik ini. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Keck dan Sikkink (1998), bahwa media dibutuhkan sebagai salah satu rekan kunci dalam upaya untuk menjangkau audiens dalam lingkup yang lebih luas. Dalam konteks isu ini, Greenpeace tampak memanfaatkan koneksinya dengan berbagai media massa internasional, baik itu digital maupun konvensional, dalam mempublikasikan berbagai aktivitas yang dilakukan melalui kampanye '*Protect the Antarctic*'. Publikasi dilakukan dalam bentuk artikel maupun video yang bergaya dokumenter. Adapun sejumlah nama media internasional yang dimaksud meliputi CNN, BBC, Reuters, The Guardian, dan Al Jazeera.

Dengan adanya publikasi dari media nasional dan internasional, ditambah dengan publikasi yang juga dilakukan pada setiap situs Greenpeace di berbagai negara diharapkan membantu organisasi tersebut dalam menjangkau lingkup audiens yang lebih luas di tingkat global. Dengan timbulnya pemahaman masyarakat internasional terhadap isu yang dibawa oleh Greenpeace, diharapkan bahwa akan ada lebih banyak lagi pihak-pihak yang bergabung dalam jaringan advokasi yang dibangun oleh organisasi tersebut. Sebagai hasilnya, meluasnya jaringan tersebut nantinya dapat memperkuat tekanan yang diberikan kepada aktor target.

Taktik *Symbolic Politics*

Dalam penerapan taktik *symbolic politics*, para aktivis dalam jaringan biasanya memanfaatkan momen, peristiwa, maupun instrumen lainnya yang bersifat simbolik dan mampu menarik perhatian publik, hingga nantinya diharapkan

dapat mendukung kegiatan advokasi mereka. Di samping itu, pemanfaatan *framing* isu juga dapat dikategorikan ke dalam penerapan taktik ini.

Merujuk pada pemaparan dalam kerangka konseptual, *framing* menjadi salah satu komponen penting dalam taktik ini. Keck dan Sikkink (1998) menjelaskan bahwa *framing* yang efektif perlu menunjukkan bahwa isu tersebut terjadi bukan secara tidak sengaja, melainkan akibat adanya satu atau lebih pihak yang bertanggung jawab akan isu tersebut. Dalam konteks isu ini, Greenpeace telah berhasil menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam industri kril adalah pihak yang membawa ancaman bagi koloni spesies penguin dan paus serta kehidupan bawah laut Antartika secara keseluruhan. Tidak hanya itu, Greenpeace juga telah secara jelas menawarkan solusi yang kredibel bagi permasalahan tersebut berupa penetapan *'ocean sanctuary'* dalam bentuk MPA di Samudra Antartika. Melalui *framing* di atas, diharapkan Greenpeace mampu menggaet simpati dari publik kemudian mendorongnya untuk bertindak dalam mendukung misi Greenpeace.

Berbicara mengenai penggunaan simbol, dapat diamati pula bahwa Greenpeace memanfaatkan penguin sebagai simbol dari kampanye *'Protect the Antarctic'*. Sebagai spesies khas Antartika yang paling dikenal publik, penguin dipilih untuk merepresentasikan keseluruhan ekosistem Samudra Antartika yang harus dilindungi dengan harapan dapat memudahkan publik untuk bersimpati terhadap narasi Greenpeace. Pemanfaatan penguin sebagai simbol dari kampanye *'Protect the Antarctic'* terlihat pada penggunaannya sebagai maskot dari sejumlah gerakan dan pameran yang dilakukan sepanjang tahun 2018 di berbagai kota besar di seluruh dunia. Beberapa aksi meliputi *'The March of the*

Penguins', *'Paper Penguin Exhibition'*, dan *'The Rise of the Penguins'*.

Selain melalui aksi-aksi di atas, penggunaan kostum penguin juga tampak pada aksi protes yang dilakukan di depan kantor-kantor pemerintahan di Hong Kong pada Maret 2018. Aksi ini merepresentasikan bagaimana industri



Gambar 1. Penggunaan kostum penguin dalam aksi protes di depan gedung pemerintahan di Hong Kong. Sumber: South China Morning Post, 2018

merebut kril sebagai makanan utama dari koloni penguin (South China Morning Post, 2018). Penggunaan kostum yang dikombinasikan dengan penggunaan tulisan seperti ini merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan kampanye yang jelas melalui taktik *symbolic politics*.

Penggunaan penguin dalam berbagai aksi yang dilakukan Greenpeace di atas secara serentak dapat dipandang sebagai penerapan *symbolic politics*, sebagaimana mereka merepresentasikan bentuk protes yang lebih besar dari keseluruhan jaringannya. Mengutip Albertus (2021) pelaksanaan aksi-aksi di atas juga dapat dikatakan sebagai tanda bahwa Greenpeace telah memanfaatkan kekuatan jaringannya melalui koordinasi di antara para aktivis yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.

Adapun aksi lain yang ditujukan untuk menarik atensi publik adalah pelaksanaan *peaceful protest* terhadap kapal *trawler*

penangkap kril. Pada 22 Maret 2018, sejumlah aktivis Greenpeace memanjat kapal *trawler* berbendera Ukraina yang berada di Selat Bransfield, Antartika. Selain untuk menarik atensi publik, pelaksanaan aksi ini diharapkan mampu menarik atensi perusahaan kril untuk menghentikan kegiatan penangkapannya di wilayah-wilayah yang sepatutnya dilindungi (Greenpeace Media, 2018). Pelaksanaan aksi protes di atas dapat dikatakan sebagai penerapan dari *symbolic politics* yang merepresentasikan penolakan keseluruhan jaringan terhadap aktivitas perusahaan kril yang mengancam ekosistem laut Antartika.

Selain memanfaatkan kekuatan jaringan aktivis, Greenpeace juga menggandeng sejumlah tokoh publik demi meningkatkan publikasinya. Pelibatan tokoh publik terlihat melalui kolaborasi antara Greenpeace dengan musisi Thom Yorke dari grup musik Radiohead dalam merilis lagu bertajuk *'Hands Off the Antarctic'*. Dengan bermakna penolakan terhadap jejak aktivitas manusia yang destruktif bagi Antartika (Billboard, 2018), lagu tersebut dapat dipandang sebagai simbol yang merepresentasikan misi Greenpeace dalam kampanye ini. Selain musisi, juga dilibatkan berbagai tokoh publik lainnya sebagai *Antarctic Ambassadors*, beberapa di antaranya meliputi aktor David Harbour, Javier Bardem, dan Ryu Jun-yeol, serta aktris Alison Sudol dan Gillian Anderson. Keterlibatan mereka dalam berbagai aksi kampanye diharapkan mampu membawa perhatian publik terhadap isu yang dibawa Greenpeace, sekaligus menjaring lebih banyak lagi pihak untuk bergabung ke dalam jaringan.

Taktik Leverage Politics

Leverage politics merujuk kepada taktik yang memanfaatkan pengaruh yang dimiliki oleh aktor lain yang lebih kuat dalam upaya suatu jaringan untuk menekan aktor target. Salah satu penerapan taktik ini dapat diamati ketika Greenpeace mencoba untuk menyuarakan isu

pembentukan MPA di Samudra Antartika melalui forum negosiasi PBB berkenaan dengan pembentukan *UN High Seas Treaty*. Perjanjian tersebut pada dasarnya mengatur mengenai penetapan MPA pada laut lepas atau *'high seas'* di seluruh dunia untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. Dengan demikian, diharapkan bahwa implementasi dari perjanjian internasional tersebut dapat menjadi desakan bagi negara-negara anggota CCAMLR untuk menyetujui penetapan berbagai proposal MPA yang diajukan di Samudra Antartika. Akan tetapi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, upaya ini belum membuahkan hasil sebagaimana perjanjian tersebut masih berada pada tahap negosiasi untuk mencapai persetujuan.

Sementara itu, aktor lainnya yang berada pada posisi yang lebih kuat adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi konsumen dari perusahaan dalam industri kril. Sebagai bagian dari *stakeholder* eksternal, diharapkan bahwa tekanan yang diberikan Greenpeace dapat diteruskan melalui *power* yang dimiliki oleh perusahaan konsumen kepada perusahaan penangkap kril sebagai target utamanya. Dalam konteks isu ini, Greenpeace berupaya menekan sejumlah perusahaan retail yang menjual produk-produk dengan bahan baku yang diperoleh dari berbagai perusahaan dalam industri kril dengan melibatkan jaringan aktivisnya yang tersebar di berbagai negara.

Salah satu perusahaan yang menjadi target tekanan Greenpeace adalah Holland & Barrett, sebuah perusahaan retail besar dengan 1.600 gerai yang tersebar di total 18 negara. Greenpeace menuntut perusahaan tersebut untuk menyingkirkan produk-produk berbahan kril yang ditunjukkan pada rak *display*-nya. Dikutip dari Greenpeace UK (2019), aksi protes dilakukan dengan menggerakkan para aktivis untuk membombardir CEO perusahaan tersebut dengan 45.000 surel yang

dikirim dalam kurun waktu 24 jam. Pada saat yang sama, para aktivis lalu melabeli produk-produk berbahan kril yang tersedia di berbagai gerai Holland & Barrett di seluruh penjuru Inggris dengan stiker yang menunjukkan dampak negatif yang dibawa oleh industri kril terhadap lingkungan. Setelah menerima tekanan yang besar dari kalangan publik, aksi protes lantas menuai keberhasilan ketika tepat keesokan harinya, Holland & Barrett memutuskan untuk menghentikan penjualan produk berbahan dasar kril di seluruh gerainya (The Guardian, 2018). Diberikannya tekanan terhadap Holland & Barrett dan sejumlah perusahaan retail lainnya lantas membuka kesempatan untuk melakukan dialog dengan perusahaan-perusahaan penangkap kril yang tergabung dalam *Association Responsible for Krill Harvesting Company* (ARK).

Selain memanfaatkan *material leverage*, Greenpeace juga melakukan praktik '*naming and shaming*' yang dapat diidentifikasi dari aksi Greenpeace dalam menyebutkan industri penangkapan kril sebagai pihak yang menimbulkan ancaman bagi ekosistem Samudra Antartika melalui aktivitas penangkapannya. Bercermin terhadap penjelasan dalam Friman (2015), praktik '*naming*' dilakukan ketika Greenpeace mempublikasikan informasi mengenai praktik penangkapan kril oleh industri yang cenderung tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pelaksanaannya, membuatnya teridentifikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ancaman yang diterima oleh ekosistem Samudra Antartika. Sementara praktik '*shaming*' ditunjukkan ketika Greenpeace menyoroti kesenjangan di antara citra dari industri tersebut yang dilabeli sebagai industri yang berkelanjutan dibandingkan dengan perilaku yang sebenarnya ditemui di lapangan. Aksi ini diharapkan mampu memunculkan tekanan eksternal terhadap

aktor target, lantas memicu mereka untuk melakukan peninjauan kembali terhadap praktik yang selama ini telah dilakukan. Adapun penerapan *leverage politics* terbukti berhasil ketika pihak industri akhirnya bersedia untuk melakukan dialog dan negosiasi dengan sejumlah organisasi lingkungan yang meliputi Greenpeace, WWF, dan The Pew Charitable Trusts.

Taktik *Accountability Politics*

Pada penerapannya, *accountability politics* biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh komitmen yang bersifat mengikat dari aktor target dalam mengimplementasikan perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan standar yang berlaku ataupun prinsip yang diadopsinya. Mengutip Keck dan Sikkink (1998) yang menyebutkan bahwa '*talk is cheap*', penyampaian komitmen dalam bentuk verbal saja tidak cukup, maka dibutuhkan bentuk komitmen yang lebih formal untuk memastikan bahwa aktor target akan betul-betul mengubah perilakunya sesuai dengan janji.

Adapun bentuk penerapan dari *accountability politics* terlihat ketika Greenpeace dengan menggandeng WWF dan The Pew Charitable Trusts berupaya untuk mengumpulkan dokumen tertulis dari perusahaan-perusahaan penangkap kril untuk melakukan pembatasan penangkapan kril. Melalui proses dialog, koalisi dari ENGO tersebut kemudian berhasil membuahkan komitmen dari ARK sebagai representasi dari industri penangkapan kril di Antartika untuk membatasi aktivitas penangkapannya pada wilayah-wilayah yang secara ekologis tergolong sensitif dan harus dilindungi. Dikenal dengan sebutan '*The ARK Commitment*', komitmen yang lahir atas kolaborasi NGO dengan industri ini secara resmi tertuang dalam bentuk seperangkat *voluntary measures*, dengan komitmen terhadap pembatasan penangkapan secara resmi dituang

ke dalam bentuk *Voluntary Restricted Zones* (VRZ) (ARK, n.d.).

PENUTUP

Berdasarkan pada pemaparan pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah ENGO yang aktivitasnya berfokus pada kegiatan advokasi, Greenpeace telah memanfaatkan pembentukan Jaringan Advokasi Transnasional sebagai bentuk strateginya dalam menyuarakan isu yang berkenaan dengan konservasi Samudra Antartika melalui penetapan MPA. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa Greenpeace telah menerapkan keempat jenis taktik yang diuraikan dalam strategi Jaringan Advokasi Transnasional untuk menekan aktor targetnya.

Pada pelaksanaan strategi tersebut, terlihat bahwa Greenpeace bekerja dengan melibatkan berbagai aktor dalam jaringan pada penerapan setiap taktiknya. Dalam menerapkan *information politics*, Greenpeace melakukan riset dan ekspedisi kemudian mempublikasikannya guna meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperluas jaringannya. Selanjutnya, Greenpeace melakukan *framing* isu melalui *symbolic politics* yang diikuti dengan pemanfaatan simbol-simbol demi menarik atensi dan dukungan. Ketika jaringan mulai diperluas melalui penerapan kedua taktik sebelumnya, Greenpeace memanfaatkan *leverage* yang dimiliki oleh aktor terkait yang lebih kuat untuk meneruskan tekanan terhadap aktor target, serta menggunakan praktik *'naming and shaming'* demi membuka peluang bagi dilakukannya dialog. Terakhir pada *accountability politics*, Greenpeace mendesak perusahaan penangkap kril untuk merilis komitmen tertulisnya melakukan pembatasan penangkapan. Dengan demikian, Penelitian ini menunjukkan bagaimana aktor non-negara memiliki signifikansinya tersendiri bagi studi

Hubungan Internasional di era kontemporer, dimana terlihat bahwa ENGO mampu memperjuangkan kepentingannya dalam melindungi lingkungan dan memengaruhi perilaku aktor lain melalui strategi dan serangkaian taktik yang telah diadopsinya.

Daftar Pustaka

- Albertus, Y. (2021). Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 239-260.
- Antarctic Ocean Alliance (AOA). (2013). *Antarctic Ocean Legacy: Towards Protection of the Weddell Sea Region*.
- Arijayanti, N., Kumala Dewi, P., & Parameswari, A. (2023). Strategi Greenpeace Mewujudkan Nol Deforestasi di Indonesia (Studi Kasus Pabrik Asia Pulp and Paper Riau). *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 2(2), 354-367.
- ARK. (n.d.). *ARK Voluntary Measures*. Retrieved March 27, 2023 from <https://www.ark-krill.org/ark-voluntary-measures>
- ASOC. (n.d.-a). *Marine Protected Areas*. Retrieved November 13, 2022, from <https://www.asoc.org/campaign/marine-protected-areas/>
- ASOC. (n.d.-b). *Weddell Sea MPA*. Retrieved November 13, 2022 from <https://www.asoc.org/campaign/weddell-sea-mpa/>
- Billboard. (2018). (2018, October 17). *Thom Yorke Releases 'Hands Off the Antarctic' For Greenpeace: Listen*. Retrieved May 5, 2023 from <https://www.billboard.com/music/rock/thom-yorke-hands-off-the-antarctic-8480406/>
- Breitmeier, H., & Rittberger, V. (2000). *Environmental NGOs in an Emerging Global Civil Society*. Tübingen: Eberhard Karls University.
- Capurro, A. (2021). The Fragile Antarctic Peninsula: Conserving Biodiversity through Marine Protected Areas. In *Latin America's Environmental Policies in Global Perspective*. Woodrow Wilson International Center for Scholars.

- CCAMLR. (2022, September 28). *About CCAMLR*. Retrieved October 15, 2022, from <https://www.ccamlr.org/en/organisation>
- CCAMLR Secretariat. (2021). *Fishery Report 2020: Euphausia superba in Area 48*. Retrieved from https://fishdocs.ccamlr.org/FishRep_48_KRI_2020.html#2_Reported_catch
- Eilstrup-Sangiovanni, M. (2019). Competition and strategic differentiation among transnational advocacy groups. *Interest Groups & Advocacy*, 8(3), 376-406.
- Greenpeace. (2017, October 27). *Greenpeace launches campaign to create 'largest protected area on Earth' - as Antarctic nations fall short on marine protection - Greenpeace International*. Retrieved September 23, 2022 from <https://www.greenpeace.org/international/press-release/6852/greenpeace-launches-campaign-to-create-largest-protected-area-on-earth-as-antarctic-nations-fall-short-on-marine-protection/>
- Greenpeace International. (2018, September 10). *A brief history of commercial whaling and Greenpeace*. Retrieved March 29, 2023 from <https://www.greenpeace.org/international/story/18307/history-commercial-whaling-greenpeace/>
- Greenpeace Media (2018, March 22). *Action against Krill Industry in the Antarctic*. Retrieved March 20, 2023 from <https://media.greenpeace.org/Detail/27MZIFJXML7RS>
- Greenpeace UK. (2019). *Impact Report 2018*. Retrieved from https://www.greenpeace.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/Greenpeace_Impact_Report-2018_FINAL.pdf
- Greenpeace USA. (n.d.). *Creating the World Park Antarctica*. Retrieved Feb 23, 2023 from <https://www.greenpeace.org/usa/victories/creating-the-world-park-antarctica/>
- Huelshoff, M. G., & Kiel, C. (2012). Swan song: Transnational advocacy networks and environmental policy in Chile – The case of the Cisnes de Cuello Negro. *Interest Groups & Advocacy*, 1(2), 260–278.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Krüger, L. et al. (2020). Antarctic krill fishery effects over penguin populations under adverse climate conditions: Implications for the management of fishing practices. *Ambio*, 50, 560-571.
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*. London: Routledge.
- McCormick, J. (2010). The Role of Environmental NGOs in International Regimes. In R. Axelrod & S. Vandeveer (Eds.), *The Global Environment: Institutions, Law and Policy* (pp. 92-109). CQ Press.
- Nicol, S., & Foster, J. (2016). The fishery for Antarctic krill: Its current status and management regime. In Siegel, V. (Ed.), *Biology and Ecology of Antarctic Krill*. Springer Cham.
- Paglia, E. (Host). (2019, March 20). *Greenpeace, CCAMLR and MPAs: An NGO Perspective on Protecting Antarctica* [Audio podcast Episode]. In *Polar Geopolitics*. <http://www.polar geopolitics.com/2019/03/>
- Ramanath, R., & Ebrahim, A. (2010). Strategies and tactics in NGO-government relations. *Nonprofit Management and Leadership*, 21(1), 21–42.
- SCMP. (2018, March 21). *Greenpeace protesters demand protection for krill from Hong Kong government*. Retrieved March 16, 2023 from <https://www.scmp.com/yp/discover/news/environment/article/3070683/greenpeace-protesters-demand-protection-krill-hong>
- Sholihat, A., Fasisaka, I., & Kumala Dewi, P. (2018). Diplomasi Lingkungan Selandia Baru dalam Menjadikan Laut Ross Antarctica sebagai Marine Protected Area melalui CCAMLR. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(2).
- Sri Upayoni, N., Kumala Dewi, P., & Dharmiasih, D. (2021). Strategi World Uyghur Congress (WUC) dalam Menyuarakan Kasus Etnis Uyghur di Xinjiang Tahun 2014 - 2019. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(2).
- The Guardian. (2018c, March 27). *Campaigners call on UK retailers to stop stocking Antarctic krill products*. Retrieved February 25, 2023 from <https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/27/campaigners-call-on-uk-retailers-to-stop-stocking-antarctic-krill-products>
- Tin, T. (2013). Environmental advocacy in the Antarctic Treaty System - a personal view from the 2000s. *The Polar Journal*, 3(2), 415-430.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial* (2nd ed.). Bumi Aksara.

Wienecke, B., Klekociuk, A., & Welsford, D. (2021).
Australia state of the environment 2021: Antarctica
[independent report to the Australian
Government Minister for the Environment,
Commonwealth of Australia, Canberra].